

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kajian Pustaka	8
1.5.1 Pengawasan Bank	8
1.5.2 Perlindungan Hukum Nasabah Bank	11
1.5.3 Lembaga Perbankan	15
1.5.4 Likuidasi Bank	19
1.5.5 Lembaga Penjamin Simpanan	21
1.6. Metode Penelitian	26
1.6.1 Tipe Pendekatan Masalah	26
1.6.2 Pendekatan Masalah	26
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	26
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	28
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	29
1.7. Sistematika Penulisan	30

BAB II KRITERIA NASABAH YANG DIJAMIN DAN LAYAK BAYAR

2.1. Simpanan Nasabah Yang Dijamin Dan Layak Bayar	32
2.1.1 Simpanan yang Dijamin	39
2.1.2 Simpanan yang Layak Bayar	40
2.2. Prosedur Pengajuan Klaim Penjaminan Terhadap Simpanan Nasabah	41
2.2.1 Tahap Rekonsiliasi dan Verifikasi Simpanan Nasabah ..	42
2.2.2 Pelaksanaan Kalim Penjaminan Simpana Milik Nasabah	45

BAB III PENYELESAIAN SIMPANAN NASABAH YANG TIDAK DIJAMIN DAN TIDAK LAYAK BAYAR

3.1. Tanggung Gugat Bank Terhadap Simpanan Nasabah Yang Tidak Dijamin Dan Tidak Layak Bayar	50
3.1.1 Hubungan Hukum Bank dan Nasabah Penyimpan	57
3.1.2 Tanggung gugat Para Pihak terhadap Simpanan yang Tidak Dijamin dan Tidak Layak Bayar	59
3.2. Upaya Hukum Terhadap Simpanan Nasabah Yang Tidak Dijamin Dan Tidak Layak Bayar	66
3.2.1 Penyelesaian melalui Non-Litigasi	66
3.2.2 Penyelesaian melalui Litigasi	69

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	82
4.2. Saran	82

DAFTAR BACAAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomo 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun Nomor 96 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2867);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang Pada Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3012)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3814 Tahun 1999)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831)

Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4903)

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 29)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 02/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3998)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2010)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431)

Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431)